

TINGKATKAN LAYANAN MASYARAKAT Kantor Pertanahan Luncurkan 'Plotting Si Gundul'

WONOSARI (KR) - Kantor Pertanahan Gunungkidul meluncurkan program Plotting Validasi Online Gunungkidul (Plotting Si Gundul). Layanan ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan masyarakat, dalam melakukan plotting dan validasi secara tepat, mudah dan gratis.

"Sesuai dengan aturan Permen 16 Tahun 2021, plotting wajib dilaksanakan dalam proses layanan pertanahan. Plotting merupakan proses pemetaan dan verifikasi keaslian sertifikat tanah dengan teknologi GPS. Dimaksudkan untuk mengetahui posisi asli lahan di dalam database peta pendaftaran BPN," kata Kasubag TU Kantor Pertanahan Gunungkidul Asok Wicaksana APTnh di dampingi Survei Pemetaan Muda Trigus Eko MT, Rabu (30/8).



Petugas melaksanakan program Plotting Si Gundul.

Diungkapkan, melalui program ini pemohon mudah memperoleh layanan dimanapun, dibentuk tim *backoffice*, produk yang dihasilkan lebih banyak, pelayanan lebih cepat, secara digital online dan lebih efektif. Layanan dimulai Senin sampai Jumat mulai pukul 08.00 Wib- 11.00 Wib via whatsapp 081390016005. "Alur pelayanan pemohon mengirimkan scan/foto ser-

tifikat dan lokasi bidang tanah. Data pemohon diterima petugas dan meneliti kelengkapan, petugas melakukan plotting validasi bidang tanah, Selanjutnya petugas mengirimkan hasil plotting file PDF kepada pemohon," ujarnya.

Trigus Eko menambahkan, petugas mengerjakan dengan mengecek apakah bidang tumpang tindih atau tidak. **(Bmp/Ded)**

APEL SIAGA DARURAT KEKERINGAN 7.000 Jiwa Terdampak, Disiapkan 800 Tangki Air

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul menggelar apel Siaga Darurat Kekeringan di Lapangan Kasatrian, Wonosari diikuti dari berbagai personel gabungan OPD terkait Rabu (30/8) kemarin.

Apel, dipimpin langsung Bupati Gunungkidul H Sunaryanta sebagai bentuk komitmen bersama meningkatkan kesiapsiagaan personel maupun sarana mengatasi bencana kekeringan di Gunungkidul. Memasuki akhir Agustus sebanyak 11 kapanewon melanda 7.000 jiwa terdampak kekeringan.

"Apel siaga ini untuk mempertahankan keterpaduan pelaksanaan tugas kemanusiaan di bidang penanggulangan bencana khususnya bencana kekeringan," kata Bupati Sunaryanta.

Dari tahun ke tahun jumlah wilayah kekeringan

di Gunungkidul terus menurun. Khusus pada tahun 2023 ini tingkat kecukupan air bagi masyarakat sudah mencapai 89 persen. Bagi wilayah yang selama ini menjadi langganan kekeringan khususnya yang mengalami kesulitan air bersih tetap akan disuplai Pemkab dalam hal ini BPBD Gunungkidul. Karena itu bupati berpesan kepada masyarakat untuk tetap tenang dalam menghadapi kondisi saat ini, karena pemerintah bersama seluruh pihak sudah siap siaga untuk membantu.

Terkait dengan status bencana kekeringan,



Bupati Gunungkidul mengecek kesiapan sarana operasional dropping air.

lebih sebanyak 800 tangki air bersih. Dari sebanyak 800 tangki baru terpakai kurang lebih 50 persen atau dua kali lebih banyak dari tahun 2022. Untuk ke marau tahun ini diprediksi akan berlangsung hingga 30 September. Mendatang. "Saat ini 11 Kapanewon dan 7.000 KK sudah terdampak kekeringan," ujarnya. **(Bmp)**

pihaknya sudah menyiapkan SDM serta melibatkan seluruh lapisan baik dari Pemerintah maupun Organisasi Kemasyarakatan, "Upaya mengatasi bencana kekeringan terus kami lakukan," ujarnya.

Kepala BPBD Kab. Gunungkidul Purwono menjelaskan untuk kesiapan BPBD telah menyiapkan dropping air bersih kurang

Jathilan Skwad Garangan Libatkan Generasi Muda



KR-Dedy EW

Pertunjukan seni jathilan Skwad Garangan Gari.

WONOSARI (KR) - Grup Jathilan Skwad Garangan Gari tampil dalam event Pentas Seni di kompleks Taman Budaya Gunungkidul (TBG), Selasa (29/8) sore. Pertunjukan ini disaksikan langsung ratusan warga Gunungkidul serta disiarkan secara live streaming. Sebelumnya pa-

da hari yang sama ditampilkan juga Reog Catur Manunggal Tanjungsari."

"Pentas seni ini untuk memberikan hiburan kepada Masyarakat, serta menjadi ruang bagi para pelaku seniman untuk berekreasi," kata Kepala UPT TBG Nur Agus Basuki MM. Pimpinan Skwad Garang-

an Gari Riyan mengungkapkan, grup ini sudah terbentuk sejak 2020 lalu. Latihan empat kali dalam satu bulan, jathilan ini para pemainnya sebagian besar kaum kawula muda. Jathilan skuad garangan memberikan ruang bagi pemuda yang ingin ikut mendukung upaya pelestarian seni budaya jathilan di Gunungkidul.

"Dalam pentas ini ditampilkan dua babak pertama yakni Sendratari Sang Prabu Garangan, sedangkan babak kedua rampak barang keuan alas dan bantengan," imbuhnya. Pada pentas seni di TBG dihari sebelumnya, Senin (28/8) menampilkan seni Thekthek Ngestirejo Tanjungsari. **(Ded)**

SATU BANGUNAN RESTO DIBONGKAR Penertiban TKD di Gunungkidul Berlanjut

WONOSARI (KR) - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemda DIY sudah mengirim surat kepada lurah se Gunungkidul untuk melakukan penertiban penggunaan Tanah Kas Desa (TKD) dan tanah Sultan Ground (SG) di wilayah masing-masing. Pemerintah kelurahan diminta melakukan eventarisasi penggunaan TKD maupun SG, selanjutnya jika terjadi pelanggaran diharapkan untuk dapat segera ditertibkan. Langkah pertama penertiban diserahkan kepada pemerintah kelurahan, jika terjadi penyimpangan segera diluruskan. Hal ini sudah terjadi di wilayah Kalurahan



KR-Endar Widodo
Edy Basuki SIP MSI

Girisekar, Kapanewon Panggang. "Resto yang semula beridri di TKD sudah dibongkar oleh pemilikinya dan dipindahkan ke tanah pribadi," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpo) PP Kabupaten

Gunungkidul Edy Basuki SIP MSI, Rabu (30/8).

Kegiatan penertiban secara mandiri sudah dimonitoring dari Satpol PP DIY dan Kabupaten di Kalurahan Girisekar, Kapanewon Panggang, Kalurahan Baleharjo, Kapanewon Wonosari dan Kalurahan Bandung, Kapanewon Playen. Temuan monitoring tiga kalurahan tersebut sebagian besar masalahnya TKD yang digunakan untuk fasilitas umum, seperti terminal, kios desa, sekolah dan sebagainya pengurusan ijin kepada Gubernur belum terselesaikan. Sehingga kalurahan-kalurahan tersebut sudah diminta memproses lagi ke Gu-

berburu. Sementara jika terjadi kasus seperti resto di Panggang pemilikinya diminta membongkar sendiri. Jika tidak segera membongkar SAT Pol PP yang akan melakukan pembongkaran. "Untuk sementara penertiban tanah kas desa di Gunungkidul dilakukan secara persuasif dan edukatif," tambahnya.

Meski demikian Satpol PP Kabupaten Gunungkidul terus melihat perkembangan penanganan masing-masing kalurahan, jika sudah berjalan tinggal melakukan pemantuan. Tetapi bagi kalurahan yang lambat bergerak akan terus didorong segera melangkah. **(Ewi)**

PENGOLAHAN SAMPAH DI PANTAI SELATAN Pemkab Bangun 2 TPS3R

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul membangun lagi dua Tempat Pengolahan Sampah Reduce Reuse Recycle (TPS3R) di kawasan wisata pantai selatan menelan biaya Rp 756 juta. Kedua TPS3R tersebut dibangun di Kalurahan Kemadang, Kapanewon Tanjungsari dan di Kapanewon Tepus.

Sub Koordinasi Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Gunungkidul, Dwi Wiyani mengatakan keberadaan Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari di Kalurahan Baleharjo, Wonosari saat ini semakin meningkat. "Kedua TPAS baru tersebut nantinya menjadi solusi pembuangan dan pengolahan sampah," katanya, Rabu (30/8).

Pemkab sudah lama memiliki rencana memperluas area TPAS. dan disisi lain, juga ada upaya membangun fasilitas TPS3R. Dari Total pembangunan TPS mencapai Rp756 juta, rinciannya, untuk membangun

TPS3R di Kalurahan Kemadang sebesar Rp 353,09 juta dan di Kalurahan Tepus sebesar Rp 353,38 juta.

Untuk lokasi TPS masing-masing memiliki luas sekitar 160 meter persegi. Sedangkan untuk pengerjaan berlangsung selama 90 hari dan ditarget sudah selesai di akhir Oktober 2023. "Sekarang masih dalam proses dan kami optimistis dapat selesai tepat waktu," ujarnya.

Untuk pembangunan TPS3R memang bukan hal yang baru karena di Gunungkidul sudah ada 14 lokasi sehingga total di tahun ini ada 16 lokasi. Keberadaan fasilitas ini sangat membantu karena ada pengolahan dan pemilahan sehingga dibuang benar-benar residu alias tidak bisa dipergunakan atau diolah lagi dan yang benar-benar dibuang ke TPAS adalah yang residu. Sedang sampah yang masih bisa dipergunakan, maka akan dimanfaatkan lagi. "Dengan cara seperti ini bisa memperpanjang usia TPAS," ujarnya. **(Bmp)**

DARI BANTUAN PUSAT DAN APBD 1.024 Rumah Tidak Layak Huni Diperbaiki



KR-Bambang Purwanto

Bupati Gunungkidul resmikan rumah layak huni di Ngléri.

WONOSARI (KR) - Bupati Gunungkidul H. Sunaryanta meresmikan Rumah Layak Huni (RLH) hasil Kolaborasi Bantuan Stimulan Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten di Kalurahan Ngléri, Kapanewon Playen dan program perbaikan rumah seluruhnya saat ini mencapai 1.024 unit. Terkait dengan upaya pemerintah un-

tuk melakukan program perbaikan rumah tidak layak huni kini terus dilakukan. "Secara umum, Gunungkidul masih sangat membutuhkan dan masih banyak yang belum terintansi untuk menerima bantuan perumahan," kata Bupati H Sunaryanta, Rabu (30/8)

Saat ini yang sudah terdaftar mencapai 17.381

yang menjadi tugas Pemerintah daerah untuk terus mengupayakan. Terdapat sebanyak 347 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah diintervensi dan sebanyak 577 BSPS yang sudah diselesaikan. Atas nama Pemerintah dan masyarakat penerima bantuan pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Pusat atas pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga.

Kepala Balai Penyedia Perumahan Bagian Jawa III Salahudin menjelaskan untuk bantuan bersumber dari dua anggaran yakni dari APBD dengan bantuan RTLH dan dari APBN dengan bantuan BSPS. Setiap penerima bantuan menerima sejumlah uang Rp 20 juta rupiah, dengan rincian Rp 17,5 juta untuk material dan Rp 2,5 juta untuk pembayaran tukang. **(Bmp)**

PENYELENGGARAAN GRIYA ABHIPRAYA Langkah Pemulihan Restoratif dan Reintegratif

WATES (KR) - Penjabat (Pj) Bupati Kulonprogo Ni Made Dwipanti Indrayanti MT menegaskan, pemerintah kabupaten (pemkab) setempat mendukung pembentukan dan penyelenggaraan Griya Abhipraya yang dikelola Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkum HAM) DIY.

"Griya Abhipraya merupakan langkah progresif yang melingkupi prinsip restoratif dan reintegratif. Kedua nilai yang memiliki *output* akan pemulihan. Pemulihan mental spiritual, pemulihan sosial dan pemulihan ekonomi," kata Ni Made usai menandatangani nota kesepakatan tentang Sinergi dalam Penyelenggaraan Griya Abhipraya antara Kanwil Kemenkum HAM DIY dengan Pemkab Kulonprogo di Ruang Meno-

reh kantor pemkab setempat, Selasa (29/8).

Griya Abhipraya merupakan tempat atau wadah untuk menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan bagi klien masyarakat, yang menampung segala bentuk kegiatan pemberdayaan, sinergitas dan kolaborasi yang ditujukan bagi perbaikan diri dan peningkatan kualitas pelanggaran hukum.

Ni Made berharap kemitraan mampu meningkatkan kapasitas dan membangun kualitas diri bagi para narapidana sebelum habis masa tahananannya. Selain itu melalui wadah tersebut diharapkan juga mengurangi angka residivis, dengan pendampingan yang dilakukan nantinya diharapkan bisa jadi anggota masyarakat yang produktif dan bermoral selepas dari



KR-Asrul Sani

Ir Sudarna (dua kiri) dan pejabat Kanwil Kemenkum HAM DIY menunjukkan nota kerjasama penyelenggaraan Griya Abhipraya.

tahanan.

"Griya Abhipraya merupakan wadah yang tepat untuk melakukan pendampingan dan nota kesepatu akan menjadi cerminan dukungan Pemkab Kulonprogo terhadap kegiatan di Griya Abhipraya," tegas Ni Made.

Pihaknya akan menunjuk beberapa perangkat daerah untuk melaksanakan

pendampingan dan pelatihan program dan kegiatan bersama Balai Masyarakat Kelas I Yogyakarta meliputi bidang tenaga kerja dan transmigrasi, perdagangan dan perindustrian, pendidikan pemuda dan olahraga, sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta bidang pertanian dan pangan. **(Rul)**

SUBSIDI ENERGI TEMBUS RP 500 TRILIUN BPH Migas Miliki Fungsi Strategis

WONOSARI (KR) - Anggota Komisi VII DPR RI Drs HM Gandung Pardiman MM mengungkapkan, keberadaan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memiliki fungsi yang sangat strategis. Karena memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi hilir Migas. Jika di wilayah lain elpiji 3 kg langka, alhamdulillah di DIY masih aman.

"Pengaturan dan pengawasan ini menjadi penting, agar pelayanan kebutuhan Migas masyarakat lebih maksimal. Karena BPH Migas memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi hilir Migas," kata Drs HM Gandung Pardiman MM di acara Seminar Umum Kebijaksanaan Hilir Migas Bersama BPH Migas

dan DPR RI di Balai Kalurahan Ngalang, Gedangsari, Selasa (29/8).

Kegiatan dihadiri Ketua Yayasan GPC Syarif Guska Laksana SH, Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman, Waket DPRD yang juga Ketua DPD Golkar Gunungkidul Heri Nugroho SS, Anggota Fraksi

Golkar Sarjana SE dan undangan. Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan, saat ini Bahan Bakar Minyak dan elpiji menjadi kebutuhan yang vital. Sehingga peran negara hadir untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Konsumsi setiap tahun selalu naik, se-

iring dengan pertumbuhan penduduk dan jumlah kendaraan bermotor. "Bahkan subsidi energi yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 500 triliun baik itu untuk listrik, elpiji hingga bbm," ujarnya.

Ketua Yayasan GPC Syarif Guska Laksana SH menambahkan, melalui seminar ini masyarakat akan lebih memahami layanan Migas. Sehingga Masyarakat tidak akan kesulitan untuk mendapatkan kebutuhan baik itu bbm maupun elpiji. Peserta yang mengikuti seminar, diharapkan juga untuk menyebarluaskan terkait dengan kebijakan BPH Migas. Sehingga masyarakat dapat mengetahui tentang mekanisme pelayanan berkaitan dengan migas. **(Ded)**



KR-Dedy EW

HM Gandung Pardiman MM bersama dan peserta seminar.